

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM JUAL BELI AKUN ILEGAL "NETFLIX" MELALUI MEDIA INTERNET

Ni Luh Putu Ayu Cahyani<sup>1</sup>, I Nyoman Putu Budiarta<sup>2</sup>, Ni Made Puspasutari Ujianti<sup>3</sup>  
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Indonesia  
[ayucahyaniniluhputu@gmail.com](mailto:ayucahyaniniluhputu@gmail.com)<sup>1</sup>, [budiarthaputu59@gmail.com](mailto:budiarthaputu59@gmail.com)<sup>2</sup>, [puspa.niwapong@gmail.com](mailto:puspa.niwapong@gmail.com)<sup>3</sup>

### Abstrak

Teknologi menjadi sesuatu yang melekat dalam kehidupan masyarakat. Teknologi seperti Internet memungkinkan penggunaannya untuk dapat melakukan berbagai macam hal salah satunya yaitu penjualan akun Netflix. Peranan hukum pun mulai dipertanyakan dalam hal perlindungan hukum bagi konsumen, sebab maraknya penjualan akun ilegal Netflix membuat konsumen resah dalam membeli akun Netflix. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi konsumen atas pembelian berlangganan dari akun ilegal Netflix dan bagaimana tanggungjawab penjual produk terhadap pengguna jasa layanan akun ilegal Netflix. Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam jual beli akun ilegal Netflix melalui media internet, untuk mengetahui dan menghindari akibat dari jual beli akun ilegal Netflix melalui media internet. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penjualan akun ilegal Netflix melalui media internet merupakan pelanggaran hak cipta, serta netflix telah memperketat syarat dan ketentuan bagi pengguna jasa akun Netflix agar tidak terjadi pemakaian akun Netflix ilegal.

**Kata Kunci:** Teknologi, Perlindungan Hukum, Akun Ilegal

### Abstract

*Technology is something that is inherent in people's lives. Technology such as the Internet allows users to do various things, one of which is the sale of Netflix accounts. The role of law has begun to be questioned in terms of legal protection for consumers, because the rampant sale of illegal Netflix accounts makes consumers uneasy about buying Netflix accounts. So, the problems posed are, 1) How is the form of legal protection for consumers for purchasing subscriptions from illegal Netflix accounts? And how is the product seller responsible for users of Netflix illegal account services? The objectives of this study are (1) to find out and about legal protection for consumers in buying and selling illegal Netflix accounts via the internet media, (2) to find out and avoid the consequences of buying and selling illegal Netflix accounts via the internet media. This research uses normative research methods, using statutory approaches and conceptual approaches. The results of this study conclude that the sale of illegal Netflix accounts via the internet media is a copyright violation, and Netflix has tightened the terms and conditions for Netflix account service users to prevent the use of illegal Netflix accounts.*

**Keywords:** Technology, Legal Protection, Illegal Account

## I. PENDAHULUAN

Meningkatnya praktik jual beli akun ilegal "Netflix" melalui media internet yang berpotensi merugikan konsumen. Hal ini dapat terjadi karena para penjual seringkali menjual akun yang didapatkan secara ilegal atau menggunakan cara-cara yang melanggar ketentuan "Netflix". Konsumen yang membeli akun tersebut juga tidak mengetahui apakah akun yang dibeli tersebut legal atau tidak, sehingga mereka dapat mengalami kerugian jika akun tersebut diblokir atau dihapus oleh "Netflix". Karena praktik jual beli akun ilegal "Netflix" dapat merugikan konsumen, maka perlindungan hukum yang memadai diperlukan untuk melindungi hak-hak konsumen dari praktek tersebut.

Fenomena semakin marak terjadi mengenai jual beli akun “Netflix” secara ilegal melalui media internet. Biasanya, praktikum ini dilakukan oleh penjual yang memperoleh akun tersebut dengan cara-cara yang melanggar ketentuan dan aturan yang berlaku di “Netflix”. Setelah itu, akun-akun tersebut dijual dengan harga yang lebih murah dari harga resmi tersedia oleh Netflix.

Praktik jual beli akun ilegal "Netflix" ini dapat menimbulkan berbagai masalah bagi konsumen, terutama jika akun yang dibeli tersebut ternyata tidak legal. Konsumen yang membeli akun tersebut mungkin tidak mengetahui apakah akun yang dibeli tersebut didapatkan secara legal atau tidak, sehingga mereka dapat mengalami kerugian jika akun tersebut diblokir atau dihapus oleh "Netflix". Selain itu, konsumen yang membeli akun ilegal juga dapat menjadi korban dari tindakan penipuan atau pemalsuan identitas yang dilakukan oleh para penjual.

Dalam konteks ini, perlindungan hukum yang memadai bagi konsumen sangat diperlukan untuk menghindari terjadinya praktik jual beli akun ilegal "Netflix" yang merugikan. Di sisi lain, "Netflix" sebagai penyedia layanan juga perlu memperhatikan masalah ini dan meningkatkan upaya untuk mengatasi praktik jual beli akun ilegal "Netflix" melalui media internet. Upaya ini dapat dilakukan melalui penerapan kebijakan dan tindakan yang lebih ketat terhadap praktik ilegal dan penyebaran informasi tentang risiko yang mungkin terjadi bagi konsumen yang membeli akun "Netflix" secara ilegal. bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen atas pembelian berlangganan dari akun ilegal Netflix, bagaimana tanggung jawab penjual produk terhadap pengguna jasa layanan akun ilegal Netflix?

## **II. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian normatif, yaitu metode yang berfokus pada analisis norma atau aturan yang berlaku dalam suatu sistem atau lingkungan tertentu, terutama dalam konteks hukum (Jonaedi Efendi 2018). Dalam penelitian hukum, metode normatif sering digunakan untuk memahami dan menganalisis norma-norma hukum yang relevan dengan permasalahan atau isu yang sedang diteliti.

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Perlindungan hukum bagi konsumen memiliki peranan penting dalam dunia bisnis. Perlindungan hukum ini dengan memberikan jaminan dan keamanan pada konsumen saat bertransaksi, akan mendorong terciptanya lingkungan bisnis yang sehat dan adil (Rahardjo 2000).

Perlindungan hukum untuk konsumen mencakup hak-hak dalam melakukan transaksi dan menerima produk atau jasa yang aman dan berkualitas. Hak-hak tersebut termasuk hak atas informasi, keselamatan, kualitas, ganti rugi, dan perlindungan hukum. Indonesia memiliki beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum perlindungan konsumen, diantaranya adalah Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang memberikan hak dan kewajiban konsumen serta tugas dan tanggung jawab pengusaha untuk memberikan produk atau jasa yang aman dan berkualitas. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal juga mengatur standar pelayanan minimal yang harus dipenuhi oleh penyedia jasa, termasuk produk atau jasa yang disediakan untuk konsumen. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2019 tentang Perlindungan Konsumen Dalam Perdagangan Elektronik juga mengatur perlindungan konsumen dalam transaksi perdagangan elektronik, termasuk perlindungan terhadap informasi pribadi konsumen (Zahurin 2012).

Di Indonesia, terdapat beberapa lembaga pemerintah yang bertanggung jawab dalam melindungi hak-hak konsumen, seperti Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA), dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Tugas dari lembaga-lembaga tersebut adalah untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi antara konsumen dan pengusaha. Selain itu, jika ada pengusaha yang menjual produk yang tidak memenuhi standar yang berlaku, konsumen dapat melaporkannya kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) atau Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI).

Perlindungan hukum bagi konsumen sangatlah penting dalam menjaga hak-hak konsumen, mencegah praktik bisnis yang merugikan konsumen, serta menciptakan lingkungan

bisnis yang adil dan sehat. Sebagai hasilnya, pengusaha diharapkan selalu memenuhi kewajiban mereka dalam menyediakan produk atau jasa yang aman dan berkualitas, agar tercipta hubungan bisnis yang menguntungkan bagi kedua belah pihak, yaitu pengusaha dan konsumen

Tujuan utama dari perlindungan hukum adalah untuk memastikan bahwa hak-hak individu atau kelompok dilindungi dari tindakan yang tidak sah atau merugikan yang dilakukan oleh pihak lain, termasuk pemerintah, organisasi, atau individu lainnya. Dengan perlindungan hukum yang kuat, setiap orang akan merasa aman dan dijamin keadilan dalam masyarakat, serta hak-hak mereka akan dihormati dan dilindungi tanpa diskriminasi.

Perlindungan hukum juga bertujuan untuk mencegah pelanggaran hukum dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Hal ini dapat dicapai melalui penegakan hukum dan pengadilan yang adil dan transparan. Perlindungan hukum juga dapat mempromosikan perubahan sosial dan mendorong perbaikan dalam sistem hukum dan kebijakan publik.

Dalam hal perlindungan konsumen, tujuan utama dari hukum menjaga keamanan dan kepercayaan konsumen terhadap produk dan layanan yang ditawarkan oleh pelaku bisnis, serta memastikan bahwa setiap konsumen memiliki hak yang sama dan terlindungi oleh hukum. Tujuan lain dari hukum ini adalah untuk memberikan solusi bagi konsumen yang telah mengalami kerugian akibat pelanggaran hak-hak mereka, serta meningkatkan kesadaran konsumen tentang hak-hak mereka. Selain itu, perlindungan hukum ini juga bertujuan untuk mendorong praktik bisnis yang bertanggung jawab dan adil, serta memastikan ketersediaan informasi yang cukup bagi konsumen tentang produk dan layanan yang ditawarkan di pasar.

Perlindungan hukum untuk konsumen adalah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat guna melindungi hak-hak konsumen selama melakukan transaksi pembelian barang atau jasa. Tujuan dari perlindungan ini adalah untuk memastikan bahwa setiap konsumen diperlakukan secara adil dan tidak dirugikan dalam segala aspek kehidupannya, terutama dalam hal penggunaan barang atau jasa (Muchsin 2003).

Perlindungan hukum terhadap konsumen sangat penting dalam memastikan bahwa setiap konsumen mendapatkan perlakuan yang adil dan tidak merugikan dalam melakukan transaksi jual beli barang atau jasa. Hak-hak konsumen harus dijamin oleh negara dan masyarakat, terutama dalam hal hak atas informasi, keamanan, keselamatan, pemenuhan hak konsumen, dan ganti rugi (Hariyani 2017).

Salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen adalah hak atas informasi. Produsen atau pedagang harus memberikan informasi yang jelas dan akurat mengenai produk atau jasa yang ditawarkan. Informasi ini harus mencakup informasi tentang kualitas, keamanan, harga, dan asal-usul produk atau jasa. Konsumen berhak mendapatkan informasi yang benar dan transparan sehingga mereka dapat membuat keputusan yang tepat dan cerdas dalam melakukan pembelian.

Selain hak atas informasi, konsumen juga memiliki hak atas keamanan dan keselamatan. Produsen atau pedagang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa produk atau jasa yang mereka tawarkan sudah melalui uji coba dan tidak menimbulkan risiko bagi konsumen. Konsumen berhak untuk memperoleh produk atau jasa yang aman dan tidak membahayakan kesehatan dan keselamatannya. Hal ini sangat penting untuk mencegah terjadinya kerugian atau bahkan kecelakaan yang merugikan konsumen.

Konsumen juga memiliki hak atas pemenuhan hak konsumen. Artinya, konsumen berhak untuk memperoleh produk atau jasa yang sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh produsen atau pedagang. Jika terjadi ketidaksesuaian antara apa yang dijanjikan dan kenyataannya, konsumen berhak untuk mengajukan gugatan atau tuntutan ganti rugi. Hal ini merupakan bentuk perlindungan hukum untuk memastikan bahwa konsumen tidak dirugikan atau ditipu oleh produsen atau pedagang.

Hak atas ganti rugi merupakan hak yang dimiliki oleh konsumen jika terjadi kerugian akibat dari produk atau jasa yang cacat atau tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh produsen atau pedagang. Konsumen berhak untuk memperoleh penggantian atau kompensasi atas kerugian

yang dideritanya. Hal ini penting untuk memastikan bahwa produsen atau pedagang bertanggung jawab atas produk atau jasa yang mereka tawarkan.

Negara memiliki kewajiban untuk mengawasi dan menindak produsen atau pedagang yang melanggar hak-hak konsumen, serta memberikan sanksi atau hukuman yang sesuai. Selain itu, negara dan masyarakat juga memiliki kewajiban untuk memberikan edukasi atau informasi kepada konsumen mengenai hak-hak dan kewajiban mereka dalam melakukan transaksi jual beli barang atau jasa. Dengan demikian, konsumen dapat lebih memahami hak-hak mereka dan dapat lebih mudah memperjuangkan hak-hak mereka jika dirugikan oleh produsen atau pedagang.

Selain itu, dalam era digital, negara dan masyarakat juga memberikan perlindungan khusus untuk konsumen dalam melakukan transaksi jual beli melalui media internet. Perlindungan ini mencakup pengawasan, penindakan, dan edukasi khusus terkait dengan perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli online. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya penipuan dan praktik bisnis yang merugikan konsumen dalam transaksi jual beli melalui media internet.

Selain hak-hak konsumen yang telah disebutkan di atas, ada beberapa hal lain yang harus dipertimbangkan oleh konsumen dalam membeli produk atau jasa, seperti hak untuk memilih, hak untuk mengeluh, dan hak untuk didengar. Konsumen berhak memilih produk atau jasa yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya. Konsumen juga berhak untuk mengeluh jika produk atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan apa yang diharapkan atau tidak memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan. Selain itu, konsumen juga berhak untuk didengar dan mendapatkan respons yang tepat dari produsen atau pedagang jika terjadi masalah atau keluhan terkait dengan produk atau jasa yang telah dibeli.

Untuk dapat melindungi hak-hak konsumen, negara dan masyarakat harus bekerja sama untuk mengembangkan mekanisme perlindungan konsumen yang efektif dan efisien. Salah satu mekanisme perlindungan konsumen yang dapat dilakukan adalah dengan membentuk lembaga perlindungan konsumen yang independen dan memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa antara konsumen dan produsen atau pedagang. Selain itu, lembaga perlindungan konsumen juga dapat memberikan edukasi dan informasi yang tepat kepada konsumen mengenai hak-hak mereka dan memberikan sanksi atau hukuman kepada produsen atau pedagang yang melanggar hak-hak konsumen (Porta 1999).

Dalam rangka mewujudkan perlindungan konsumen yang efektif dan efisien, penting bagi konsumen untuk selalu berhati-hati dalam melakukan transaksi jual beli barang atau jasa. Konsumen harus memperhatikan dengan seksama informasi yang diberikan oleh produsen atau pedagang mengenai produk atau jasa yang ditawarkan, membandingkan harga dan kualitas produk atau jasa yang ditawarkan, serta memeriksa kembali ketentuan dan syarat-syarat transaksi sebelum melakukan pembelian. Dengan demikian, konsumen dapat memperoleh produk atau jasa yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan mereka, serta terhindar dari praktik bisnis yang merugikan.

1. *Tanggung Jawab Penjual Produk terhadap Pengguna Jasa Layanan Akun Ilegal Netflix*
  - a. Faktor Penyebab Terjadinya Jual Beli Akun Ilegal Pada Pengguna Netflix

Penjualan akun ilegal Netflix telah menjadi masalah yang semakin marak terjadi di masyarakat. Fenomena ini terjadi karena banyaknya orang yang ingin menonton film dan serial di Netflix dengan harga yang lebih murah. Beberapa faktor penyebab terjadinya jual beli akun ilegal pada pengguna Netflix bisa dilihat dari beberapa faktor berikut ini (Dewi 2015).

Pertama, harga yang lebih murah menjadi salah satu faktor utama terjadinya penjualan akun ilegal Netflix. Ada banyak situs yang menawarkan akun Netflix dengan harga yang jauh lebih rendah daripada harga resmi yang ditawarkan oleh Netflix. Sebagian besar pembeli yang tertarik membeli akun ilegal adalah orang-orang yang tidak mampu membayar langganan Netflix dengan harga yang ditawarkan oleh Netflix. Meskipun demikian, hal ini tentunya bertentangan dengan hukum yang berlaku, dimana perdagangan akun Netflix ilegal merupakan tindakan melanggar hukum.

Kedua, akses yang lebih mudah juga menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya jual beli akun ilegal. Dalam beberapa kasus, orang-orang memilih membeli akun Netflix ilegal karena aksesnya lebih mudah daripada membeli akun resmi dari Netflix. Mendapatkan akun Netflix ilegal dengan cepat dan mudah dapat dilakukan melalui internet, sedangkan pembelian akun resmi dari Netflix membutuhkan beberapa proses verifikasi dan pembayaran yang lebih rumit. Namun, konsumen yang membeli akun Netflix ilegal harus memahami bahwa akses mudah ini beresiko karena keamanan dan kualitas layanan tidak terjamin.

Ketiga, ketidaktahuan konsumen juga menjadi faktor penyebab terjadinya jual beli akun ilegal Netflix. Ada beberapa konsumen yang tidak mengetahui bahwa mereka membeli akun Netflix yang ilegal. Beberapa orang membeli akun Netflix dari situs yang terpercaya, namun tidak menyadari bahwa situs tersebut menjual akun Netflix yang ilegal. Dalam beberapa kasus, orang-orang tidak mengetahui bahwa mereka membeli akun ilegal hingga mereka mengalami masalah teknis atau dilarang akses oleh Netflix.

Keempat, praktik penipuan juga menjadi salah satu faktor utama terjadinya jual beli akun ilegal Netflix. Penjualan akun ilegal Netflix banyak dilakukan oleh para penipu yang menawarkan akun Netflix dengan harga yang sangat murah. Namun, setelah pembeli mentransfer uang, akun Netflix yang dijanjikan tidak pernah diberikan atau diblokir oleh Netflix. Hal ini membuat konsumen yang membeli akun Netflix ilegal mengalami kerugian finansial yang cukup besar.

Kelima, kebutuhan pasar juga menjadi faktor penyebab terjadinya jual beli akun ilegal pada pengguna Netflix. Ada beberapa orang yang menjual akun Netflix ilegal sebagai bisnis atau kebutuhan pasar. Mereka memanfaatkan permintaan yang tinggi dari orang-orang yang ingin menonton film dan serial di Netflix dengan harga yang lebih murah. Hal ini sangat merugikan Netflix dan juga merugikan konsumen karena mengakibatkan keamanan dan kualitas layanan menjadi tidak terjamin.

Keenam, Hukum, Ilmu Hukum (Dogmatik Hukum) dan Teori Hukum oleh para pemikir hukum masih terus mengundang kontroversi, karena kadang-kadang dalam Teori Hukum pun ditemukan berbagai topik yang masuk dalam bahasan Filsafat Hukum atau Jurisprudence, atau juga Filsafat Hukum pun dibahas dalam Ilmu Hukum. Namun dari segi metode kajiannya (Budhiarta 2018).

#### b. Tanggung Jawab Penjual Produk Netflix

Akun ilegal adalah akun yang diperoleh atau digunakan dengan melanggar syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh penyedia layanan atau platform. Dengan kata lain, akun tersebut diperoleh atau digunakan dengan cara yang melanggar aturan atau kebijakan platform, seperti Netflix (Dewa Eri Reswara 2023).

Sebagai contoh, beberapa orang mungkin membagikan kredensial log-in Netflix mereka kepada teman atau anggota keluarga yang tidak diizinkan sebagai pengguna resmi menurut syarat layanan. Meskipun ini mungkin terlihat tidak berbahaya, sebenarnya merupakan pelanggaran terhadap syarat dan ketentuan Netflix, yang menyatakan bahwa pengguna tidak diizinkan untuk memberikan informasi login mereka kepada orang lain.

Dalam beberapa kasus, "akun ilegal" juga dapat dibuat menggunakan informasi curian atau palsu, seperti nomor kartu kredit yang dicuri, alamat email palsu, atau informasi palsu lainnya. Akun-akun ini biasanya digunakan untuk mengakses layanan atau konten tanpa membayar, yang merupakan bentuk pencurian.

Menggunakan "akun ilegal" tidak hanya melanggar syarat dan ketentuan platform, tetapi juga dapat menjadi tindakan kriminal dalam beberapa kasus, seperti jika akun tersebut diperoleh menggunakan informasi curian atau palsu. Oleh karena itu, penting bagi konsumen untuk menyadari risiko yang terkait dengan menggunakan atau membeli "akun ilegal" dan menghindari terlibat dalam aktivitas semacam itu.

Tanggung jawab penjual produk terhadap konsumen sangat penting dalam menjaga kepercayaan konsumen dan membangun hubungan bisnis yang saling menguntungkan. Selain faktor tanggung jawab penjual produk, ada beberapa faktor lain yang perlu dipertimbangkan dengan seksama dalam mempertahankan kepercayaan konsumen (Hidayah 2017).

Pertama, keamanan produk. Penjual harus memastikan bahwa produk yang dijual aman untuk digunakan dan tidak membahayakan konsumen. Hal ini sangat penting terutama dalam penjualan produk yang digunakan untuk kesehatan atau keamanan, seperti makanan, obat-obatan, atau produk kimia. Penjual juga harus memberikan informasi tentang cara penggunaan yang benar untuk menghindari resiko cedera atau kerusakan.

Kedua, ketersediaan produk. Seorang penjual harus menjamin bahwa produk yang dijualnya tersedia dalam kuantitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan dan permintaan konsumen yang cukup dan dapat diakses dengan mudah oleh konsumen. Jika produk tidak tersedia, konsumen dapat kecewa dan kehilangan kepercayaan pada penjual. Penjual harus memperkirakan permintaan pasar dan memastikan bahwa pasokan produk selalu tersedia untuk memenuhi permintaan tersebut.

Ketiga, transparansi informasi. Penjual harus transparan dalam memberikan informasi tentang produk, termasuk bahan-bahan yang digunakan, metode produksi, dan informasi lain yang relevan. Konsumen memiliki hak untuk mengetahui informasi ini agar dapat membuat keputusan pembelian yang tepat. Penjual juga harus menghindari informasi yang menyesatkan atau tidak akurat tentang produk yang dijual.

Keempat, jaminan kualitas. Penjual harus memberikan jaminan kualitas yang memadai pada produk yang dijual. Jaminan kualitas ini dapat berupa garansi, perbaikan atau pengembalian uang jika produk tidak sesuai dengan harapan konsumen. Jaminan kualitas dapat meningkatkan kepercayaan konsumen pada produk yang dijual dan membantu memperbaiki masalah atau kekurangan yang mungkin terjadi pada produk tersebut.

Kelima, pengalaman pengguna. Penjual harus memperhatikan pengalaman pengguna dalam menggunakan produk yang dijual. Penjual memiliki kemampuan untuk meningkatkan kepuasan konsumen dan mempertahankan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dijual dengan cara melakukan perbaikan pada produk yang ada atau mengembangkan produk baru yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen.

Dengan memperhatikan faktor-faktor diatas, penjual dapat menjaga kepercayaan konsumen dan membangun hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan. Bagi konsumen, kepercayaan pada penjual adalah hal yang penting karena akan mempengaruhi keputusan pembelian dan pengalaman menggunakan produk. Sedangkan bagi penjual, menjaga kepercayaan konsumen akan meningkatkan loyalitas konsumen dan memperluas pangsa pasar. Oleh karena itu, tanggung jawab penjual produk tidak hanya terbatas pada kewajiban hukum, tetapi juga pada kepentingan bisnis jangka panjang.

#### **IV. KESIMPULAN DAN SARAN**

##### *1. Kesimpulan*

Konsumen harus memperhatikan legalitas akun Netflix yang dibeli untuk menghindari risiko penipuan dan kehilangan uang, penjual yang menjual akun Netflix ilegal melanggar hukum dan dapat dikenai sanksi hukum, konsumen berhak mendapatkan Perlindungan hukum sebagai pembeli yang dirugikan dalam jual beli akun Netflix illegal,

Ada beberapa bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen Penjual harus mempertimbangkan tanggung jawab hukum mereka terhadap konsumen sebagai salah satu faktor penting dalam menjaga kepercayaan konsumen dan membangun hubungan bisnis yang saling menguntungkan. Pemerintah dapat meningkatkan pengawasan oleh aparat penegak hukum melalui pembentukan badan pengawas yang dipimpin oleh Menkominfo dan Menteri Hukum dan HAM. Badan pengawas tersebut bertujuan untuk memberikan sanksi kepada pelanggar dan melakukan tindakan.

##### *2. Saran*

Penutupan konten, pemblokiran situs jual beli ilegal, dan/atau hak akses pengguna yang melanggar Hak Cipta. Sementara itu, masyarakat diharapkan dapat lebih berhati-hati dalam membeli akun Netflix di luar platform resmi original Netflix. Sebagai tindakan pencegahan,

Netflix perlu memperketat syarat dan ketentuan bagi para konsumen, sehingga konsumen lebih berhati-hati dan tidak sembarangan membeli akun Netflix diluar platform resmi.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Budhiarta, I. Dewa Gede Atmadja dan I. Nyoman Putu. 2018. *Teori-teori Hukum*. Malang: Setara Press.
- Dewa Eri Reswara, Abraham Ferry Rosando. 2023. "Perlindungan Hukum Hak Cipta terhadap Penjualan Akun Netflix secara Ilegal Melalui Media Sosial." *Seminar Nasional-Hukum dan Pancasila "Penegakan Hukum pada Tindak Pidana Transnasional" 2(2)*.
- Dewi, Elia Wuria. 2015. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Hariyani, Iswi. 2017. "Perlindungan Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bisnis Jasa Pm-Tekfin." *Jurnal Legislasi Indonesia* 14(3).
- Hidayah, Khoirul. 2017. *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktik*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim. 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group.
- Muchsin. 2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Porta, Rafael La. 1999. "Investor Protection and Corporate Governance." *Journal of Financial Economics* 1(2).
- Rahardjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Zahurin. 2012. *Perlindungan Hukum bagi Keterlambatan Keberangkatan Penumpang Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Studi pada Perusahaan Pelayaran*. Dumai: PT. Batam Bahari Sejahtera Terminal Penumpang Pelabuhan.